

MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI PARIWISATA

Ali Hasan

NDIN : 0007106001

email : ali43ibc@gmail.com

Dosen Program Studi Pariwisata

Budi Hemawan

NDIN : 0523026601

email : budhiyk2000@gmail.com

Dosen Program Studi Pengelolaan Hotel

Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta

ABSTRACT

This paper reviews previous models of economic development of tourism using models such as pentahelix which generally focus more on how synergy and synchronization of government, academic, business, media, and tourism institutional actors, as well as the Tourism Satellite Account which methodologically measures only the end result tourism, while the power of the sector of economic potential and the transition of natural resource-based economic potential into a tourism-based economy has not been taken into account. Therefore such a perspective reflects only a narrative, but there is no model that mathematically explains the effect of the shift of the leading economic sector to GDP. Economic sustainability is a useful and useful purpose for human survival, therefore the model of economic development of tourism in the economic development of this society can complement the previous models, theoretically described the concept of economic development of tourism, model, measurement, program and indicators of development success tourism economy.

Keywords: *economic power of tourism, excellence sector and measurement of tourism economy*

PENDAHULUAN

UU No.32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberi peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin guna meningkatkan perekonomian daerahnya. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tentu

memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah daerah diwajibkan menggali segala sumber sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan meng-optimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah melalui jalur PAD.

Sejalan dengan upaya mengoptimalkan potensi sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat berdasarkan potensi alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki masyarakat dengan tetap me-melihara kelestariannya dalam sebuah keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah sebagai satu kesatuan sistemik serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Bagi Indonesia, salah satu basis ekonomi pariwisata terkuat adalah desa, potensi desa sebagai destinasi wisata sangat besar. Pada tahun 2015, tercatat tidak kurang dari 74.754 desa dan 8.430 kelurahan (Permendagri, 56/2015). Dengan logika linier maka kekuatan ekonomi pariwisata berbasis desa/kelurahan/masyarakat tidak kurang dari 83.184 untuk ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan.

Masalahnya, bagaimana mengembangkan potensi (83.184) itu menjadi power ekonomi, tulisan ini menawarkan sebuah konsep peranan komunitas desa dalam pembangunan ekonomi pariwisata yang disebut dengan ***Tourism Economic Development (TED)*** yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan kepariwisataan untuk menghasilkan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakatnya (Ekanayake and Long, 2012) dengan tetap memelihara kelestarian sumberdaya alam, sosial, seni dan budaya, adat istiadat yang dimiliki dalam bingkai keharmonisan dan siklus hidup produk yang sebe-narnya dalam versi ***Maha Guru (Allah SWT; Qs 30:54, 36: 68), Levitt (1960) dan Butler (1980)***. Isu strategis nasional

pengembangan kepariwisataan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pariwisata.

Ekonomi pariwisata menjadi lebih efektif pengembangannya apabila masyarakat turut aktif berperan dalam pariwisata. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi yang paling tepat untuk membangun ekonomi pariwisata dan dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat. Kondisi tersebut akan memberikan dampak pengembangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pariwisata yang berkelanjutan berbasis masyarakat dalam jangka panjang dapat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi negara, tidak terbatas pada ekonomi pariwisata.

Tujuan makalah ini adalah menjelaskan model pengembangan ekonomi pariwisata yang lebih berorientasi literature yang diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kepentingan riset yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi pariwisata. Model ***TED*** dikembangkan dalam sebuah perspektif pemberdayaan komunitas dan pemahaman nilai pariwisata, alat dan strategi pembangunan yang membuka kesempatan dan akses komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desanya menjadi desa yang mandiri. Konsep, model, strategi, program dan alat ukur keberhasilan TED yang menggambarkan sebuah ***mata rantai ekonomi*** yang tidak rentan ketika ***low-season, perubahan ekonomi makro (resesi), bencana alam dan sejenisnya*** tidak akan mematikan mata pencaharian mereka (Budi Hermawan dan Ali Hasan, 2017). Makalah ini bukan menggantikan model-model yang sebelumnya sudah ada

misalnya model Pentahelik dan *Neraca Satelit Pariwisata*. Model *TED* membahas perubahan peran pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media, dan kelembagaan pariwisata dari *inisiator dan developer* menjadi *fasilitator, membuka akses dan keterlibatan* masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

PEMBAHASAN

Konsep Pengembangan Ekonomi Pariwisata

Pengembangan Ekonomi Pariwisata (*Tourism Economic Development- TED*) adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, ragam kuliner, gaya hidup (Ali Hasan, 2018). Dalam konteks pembangunan pariwisata, komunitas secara mandiri memobilisasi aset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata wisatawan. Melalui konsep *TED*, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata, untuk itu para individu diberi pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan *small business* dengan ragam produk (barang dan jasa) yang layak ditawarkan ke pasar

Defenisi pengembangan *ekonomi pariwisata* (*tourism economic development, TED*) yang paling lazim digunakan adalah : $TED = f(\text{sumber daya alam, tenaga kerja, modal, investasi, kewirausahaan, trans-portasi, komunikasi, teknologi, ukuran, pasar, situasi ekonomi internasional})$ (Dragulanescu, and Ivan, 2012). Dengan demikian bahwa pengembangan ekonomi pariwisata dilakukan dengan (1) menggunakan potensi sumber daya manusia dan fisik

setempat untuk menciptakan peluang baru dan merangsang kegiatan ekonomi berbasis lokal, (2) melalui proses kolektif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan penciptaan lapangan kerja, (3) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan membangun kekuatan masa depan ekonomi pariwisata, dan (4) mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin kompetitif

TED sebagai konsep memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan sosial - budaya, lingkungan dan politik komunitas (Kantar, and Svrznjak, 2017). Pembangunan ekonomi pariwisata berfokus pada pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan, budaya, lingkungan dan pengembangan lintas sektor ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata secara berkelanjutan.

TED merekomendasikan sebuah proses integrasi, kolaborasi, strategi dan alat (*tool*) pemberdayaan komunitas dalam pembangunan ekonomi, pengembangan dan pemasaran sumber daya lokal dan budaya komunitas (Prihatno dan Ali Hasan, 2016; Martin, Morales, and Sinclair, 2008). Artinya mobilisasi pembangunan pariwisata itu diinisiasi oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat mulai dari proses perencanaan, pengordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di desanya. Prinsip penerapannya adalah kerjasama *stakeholders* akan menentukan keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal.

Dari sisi masyarakat, *TED* diartikan sebagai upaya untuk membebaskan

masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun jaminan keselamatan adat istiadat dan agamanya, usahanya, dan harga dirinya sebagai manusia. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari masyarakat itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian (Ali Hasan dan Budi Hermawan, 2018). Dengan demikian, pembangunan ekonomi pariwisata merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan nilai lokal, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan (*capacity of institutions*) maupun pengalaman.

Seiring dengan dinamika pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan dirinya sebagai masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera.

Dalam ekonomi yang makin terbuka, ekonomi makin berorientasi pada pasar, peluang dari keterbukaan, persaingan pasar belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Dalam keadaan ini harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh desa, sektor, dan ekonomi yang lebih maju dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui difersifikasi ekonomi pariwisata (Bojnec, 2010).

Model TED

Gambar 1 menunjukkan sebuah model yang menyediakan kerangka pengembangan ekonomi pariwisata yang menekankan pada pentingnya keberlanjutan sosial, lingkungan, kelembagaan dan budaya yang memiliki kemampuan daya saing baik secara macro, meso, meta maupun micro.¹

Pengembangan ekonomi pariwisata yang berhasil jika dapat menjaga keberlanjutan social, lingkungan, budaya dan keberlanjutan kelembagaan untuk mengelola sumber-daya lokal. Kebijakan, kemampuan manajerial dan komunikasi menjadi prasyarat bagi kesinambungan mitra kerja dan mitra usaha pariwisata (Janoszka, 2014) : UNWTO-EP (2005) merekomendasikan kerangka kerja kebijakan dan penerapannya dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan mampu mengelola dampak ekonomi, dampak sosial dan lingkungan dan budaya (tabel 1). Dua masalah penting dalam pengembangan ekonomi pariwisata yaitu kemitraan dan kelembagaan:

1. Kemitraan

-
- ¹
- macro-strategi dan stabilitas ekonomi makro yang ditentukan oleh kebijakan: kebijakan fiskal, moneter, valuta asing, komersial dan persaingan.
 - meso-struktur pendukung yang memfasilitasi interaksi dan kerjasama kemitraan (pemasok-agen perjalanan, hotel, Litbang PT, lembaga keuangan mikro, pengembangan pasar : pemasaran, ekspor, pameran, dll.), lembaga pelatihan, infrastruktur transportasi, komunikasi, dll
 - meta-kemampuan mengartikulasikan pelaku sosial untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang sesuai dan diperlukan oleh masyarakat setempat.
 - micro-kemampuan bersaing dengan menawarkan serangkaian produk wisata yang mengoptimalkan hubungan efisiensi biaya, kualitas dan keragaman dengan kemampuan untuk merespons peluang dan perubahan tren pasar (baru).

Kemitraan dalam **TED** adalah suatu pendekatan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan kemitraan dan memfokuskan pada keterkaitan (*linkage*) aktivitas antara pelaku-pelaku ekonomi pariwisata dalam satu wilayah (perdesaan/

kota/kecamatan/kabupaten/provinsi) dengan *market* (pasar pariwisata lokal, nasional dan pasar internasional) (Kum, Aslan and Gungor, 2015). Ini merupakan instrumen tentannng perlu adanya :

- a. Tanggung jawab masyarakat sebagai aktor utama pengembang dan pengelola ekonomi pariwisata.
- b. Kesiediaan masyarakat untuk berperan aktif dalam bekerjasama baik internal maupun dengan lembaga eksternal lainnya
- c. Kemitraan yang mengandalkan sumber daya ekonomi pariwisata, bukan bantuan dari luar atau asing
- d. Inisiatif ekonomi pariwisata digerakkan oleh wisatawan/pembeli, pasar, permintaan dan *supplier*
- e. Pembangunan ekonomi yang mendaya-gunakan sumber daya pariwisata;
- f. Peningkatan pendapatan dan penciptaan peluang lapangan kerja;

2. **Kelembagaan**

- a. Fasilitas dialog diantara *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk menghasilkan ide dan inisiatif
- b. Mobilisasi sumber daya ekonomi pariwisata
- c. Pengembangan kelembagaan didasarkan atas kebutuhan kegiatan ekonomi pariwisata yang sedang berlangsung

Kedua fokus tersebut dilakukan atas dasar partisipasi dan kemitraan dalam

kerangka pengembangan kelembagaan. Partisipasi dalam konteks pemerintah diartikan sebagai forum yang terorganisasi guna memfasilitasi komunikasi antar pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders* yang berkepentingan terhadap penanganan masalah atau pengambilan keputusan.

Partisipasi dan kemitraan antar pelaku dalam **TED** berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pemberdayaan, efesiensi, dan *good governance*. Pengembangan ekonomi pariwisata merupakan konsep pengembangan desa dalam upaya pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya fisik, masyarakat maupun kelembagaan untuk pembangunan pariwisata.

Pengukuran TED

Dalam konteks pembangunan ekonomi pariwisata, keberhasilan **TED** akan mendorong percepatan pertumbuhan desa. konsep **TED** menjadi alternatif bagi pengembangan desa yang didasarkan atas pembangunan kapasitas pariwisata (sumberdaya alam, manusia, kelembagaan) semakin berkembang. Model analisis pertumbuhan ekonomi pariwisata yang diduga cocok adalah model **Shift Share** (Thompson, 2007).

Model analisis untuk mengetahui potensi dan kontribusi sektoral ekonomi daerah yang dapat digerakkan oleh pariwisata, sehingga bisa menggambarkan sektor-sektor unggulan yang dapat dipacu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Lean, Chong, and Hooy, 2014). Model ini juga digunakan untuk mengukur kinerja pergeseran posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan sektor unggulan dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan dan perubahan kinerja ekonomi sektor

pariwisata dapat diformulasikan sebagai berikut: $TED = KPD + KPP + KPS$

1. **Komponen Pertumbuhan** (KPD), mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian desa yang tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah setempat.
2. **Komponen Pertumbuhan Proporsional** (KPP), mengukur perbedaan pertumbuhan lintas sektor ekonomi dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini bernilai positif, berarti sektor ekonomi pariwisata berkembang. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
3. **Komponen Pergeseran Sektor** (KPS), mengukur pergeseran kinerja sektor-sektor lokal terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat, dan apabila negatif terjadi sebaliknya. Pergeseran sektor menunjukkan perubahan kekuatan ekonomi sebuah daerah.

Program Aksi dan Indikator Keberhasilan TED

Pengembangan ekonomi pariwisata berbasis masyarakat menuntut koordinasi, kerja sama dan peran yang berimbang lintas *stakeholder*, (pemerintah, swasta, akademisi/ perguruan tinggi dan masyarakat). Di samping itu, pengembangan ekonomi pariwisata berbasis masyarakat diarahkan untuk memperkuat daya saing objek wisata dengan mengacu pada *cycle product tourism area*. Membangun kesadaran masyarakat atas kepemilikan potensi desanya sendiri (*sense of belonging*) terhadap berbagai aneka sumber daya alam dan budaya sebagai aset

pembangunan ekonomi pariwisata.

Faktor kunci (*key factor*) keberhasilan pengembangan pariwisata adalah keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan produk wisata sebagai kekuatan ekonomi sebuah desa. Agar berhasil, perlu diawali dengan kajian yang relevan dengan *core science kepariwisataan*, kemudian dilanjutkan dengan merancang program, aksi dan hasil yang diharapkan (tabel 2).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Model TED dimaknai sebagai upaya masyarakat untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa berbasis sumberdaya sendiri untuk memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Budi Hermawan dan Ali Hasan, 2017), oleh karena itu keberhasilan model TED ditandai dengan kejelasan program dan indikator keberhasilannya (tabel 3):

KESIMPULAN

Tulisan ini merupakan kajian literature yang menjelaskan model pengembangan ekonomi pariwisata yang secara teoritis mempertimbangkan ukuran perubahan dari satu atau lebih sektor ekonomi unggulan menjadi kekuatan ekonomi pariwisata yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan teoritis bagi peneliti dimasa mendatang. Model pengembangan pariwisata yang benar jika sepenuhnya memperhitungkan dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan saat ini dan keberlanjutannya dimasa depan, menangani kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat tuan rumah (hosting). Indikator utama keberhasilan pengembangan pariwisata adalah (1) minimalnya dampak negatif pariwisata terhadap masyarakat dan lingkungan; dan

(2) maksimalnya kontribusi positif pariwisata terhadap ekonomi lokal, konservasi alam dan warisan budaya, kualitas hidup masyarakat lokal dan wisatawan.

Pemerintah, akademisi, pelaku bisnis pariwisata, media, dan kelembagaan pariwisata memiliki peran sebagai fasilitator dan mobilisator masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan budaya menjadi daya tarik wisata. Pemerintah sebagai fasilitator dan akademisi pariwisata dapat mengambil peran sebagai mitra rancang, menghimbau dan memotivasi masyarakat agar bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan ekonomi pariwisata berbasis masyarakat tidak akan terwujud apabila masyarakat setempat merasa diabaikan, atau hanya dimanfaatkan, serta merasa terancam dengan kegiatan pariwisata di daerah mereka.

Indonesia memiliki keragaman destinasi yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan. Setiap desa di negara kita memiliki bahasa, budaya, tradisi, adat istiadat yang menawarkan keunikan perjalanan yang kembali ke alam dengan beragam aktivitas, atraksi dan pengalaman yang tak terlupakan oleh wisatawan. Ini sangat penting dalam setiap titik sentuh kegiatan pembangunan pariwisata karena kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Ali Hasan dan Budi Hermawan. 2018. ***Power Ekonomi Pariwisata Kabupaten Bantul***. (proses editing untuk dimuat di jurnal internasional berupatsi).

Ali Hasan, 2018. *Peran Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta Dalam Pengembangan Ekonomi Pariwisata*. Orasi Ilmiah Dies Natalis ke 31 Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, 13 Januari 2018

Alquran, 1994. ***Alquran : Terjemahan Indonesia***. Jakarta: Sari Agung

Bojnec, S. 2010. Rural Tourism, Rural Economy Diversification, and Sustainable Development. ***Academica Turistica***. 3 (1-2), 7-15

Budi Hermawan and Ali Hasan, 2017. One Village One Destination Model in Economic Development of Bantul Tourism Village. ***International Refereed Social Sciences Journal***, 8(4), 211-225

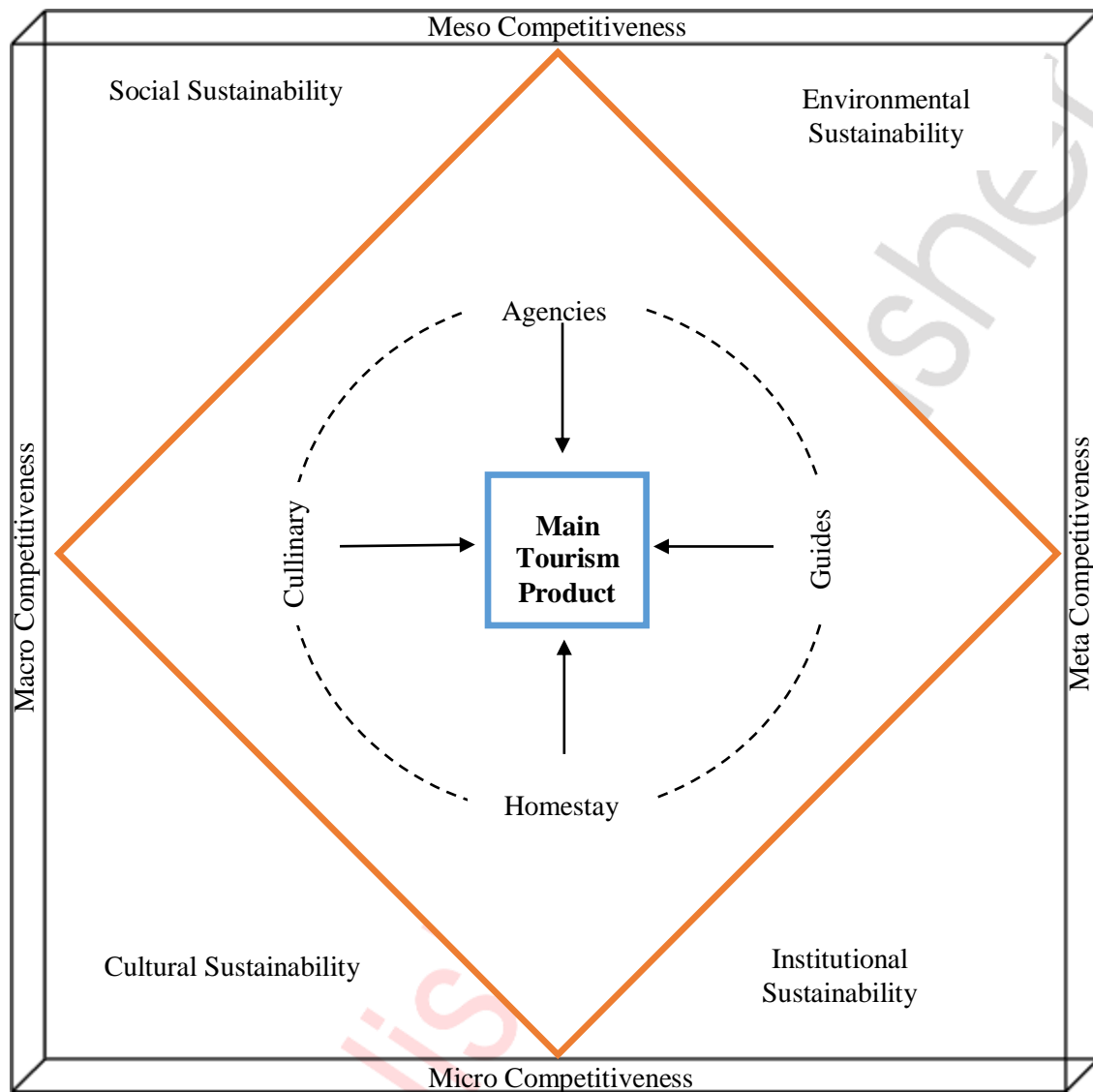
Butler, R.W. 1980. The concept of the tourist area life-cycle of evolution: implications for management of resources. ***Canadian Geographer***, 24 (1), 5-12

Dragulanescu, I. V., and Ivan M. D. 2012. Rural Tourism for Local Economic Development. ***International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences***, 2(1), 196-203

Ekanayake, E. M and Long, A. E. 2012. Tourism Development and Economic Growth in Developing Countries. ***The International Journal of Business and Finance Research***. 6 (1); 51-63

Janoszka, M. N. 2014. Innovative Activity of Small Tourist Enterprises – Cooperation with Local Institutional Partners. ***Journal Of Entrepreneurship Management And Innovation***, 27 (3), 1-12

- Kantar, S and Svrznjak, K. 2017. Development of Sustainable Rural Tourism. *Journal of Regional Development and Tourism*, 9 (1), 26-34
- Kemendagri 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kum, H., Aslan A and Gungor, M. 2015. Tourism and Economic Growth: The Case of Next-11 Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(4), 1075-1081.
- Lean, H.H., Chong, S.H and Hooy, C.W. 2014. Tourism and Economic Growth. *International Journal of Economics and Management*. 8(1),139-157
- Levitt, T. 1960. Exploit the Product Life Cycle. *Harvard Business Review*, 43(6), 81-94.
- Martin, J.L.E., Morales, N.M., and Sinclair, M.T. 2008. The Role of Economic Development in Tourism Demand. *Tourism Economics*. 14 (4), 673-690
- Prihatno dan Ali Hasan, 2016. The Impact of Kasongan Creative Industries Marketing for Local Community, *International Journal of Science and Commerce*, 7(1), 23-32
- Thompson, E. 2007. Measuring the Impact of Tourism on Rural Development: An Econometric Approach. *The Journal of Regional Analysis and Policy*, 37(2),147-154
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisata*
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32. Tahun 2004, Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*
- UNWTO- EP** - United Nations World Tourism Organization and Environment Program. 2005. *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. Available at: www.unep.fr.



Gambar 1. Model Pengembangan Ekonomi Pariwisata - TED

Tabel 1. Kerangka Kerja Pengembangan Pariwisata

Institusional	Driver	Pengelolaan Dampak		
Kebijakan dan manajerial Pemerintah, Akademisi, Asosiasi Pariwisata dan swasta lainnya	Memberikan pengalaman, memuaskan, dan memuaskan wisatawan tersedia bagi semua orang wisatawan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, disabilitas, atau dengan cara lainnya	Ekonomi	Kelangsungan hidup	memastikan kelayakan dan daya saing destinasi wisata dan perusahaan pariwisata, sehingga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
			Kemakmuran	memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap kemak-muran ekonomi tuan rumah, termasuk proporsi belanja pengunjung yang dipertahankan secara lokal
			Lapangan kerja	meningkatkan jumlah dan kualitas pekerjaan lokal yang diciptakan dan didukung oleh pariwisata, termasuk tingkat upah, kondisi layanan dan ketersediaan untuk semua wisatawan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat atau dengan cara lain
		Komunitas Lokal	Kesejahteraan	mempertahankan dan memperkuat kualitas hidup komunitas lokal, termasuk struktur sosial dan akses ke sumber daya, fasilitas dan sistem pendukung kehidupan, menghindari segala bentuk degradasi atau eksploitasi sosial
			Pemberdayaan	melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang manaje-men dan pengembangan pariwisata di masa depan di daerah mereka, serta berkonsultasi dengan para pemangku kepen-tingan lainnya.
			Keadilan	distribusi manfaat ekonomi dan sosial yang tersebar luas dan adil dari pariwisata di seluruh komunitas penerima, termasuk meningkatkan peluang, pendapatan dan layanan yang tersedia bagi masyarakat miskin.
		Lingkungan	Kemurnian	meminimalkan pencemaran udara, air dan tanah serta limbah yang dihasilkan oleh perusahaan pariwisata dan pengunjung.
			Efisiensi	meminimalkan penggunaan sumber daya yang langka (terbatas) dan tidak terbarukan dalam pengembangan dan pengoperasian fasilitas dan layanan pariwisata.
			Diversitas	mendukung konservasi kawasan alam, habitat dan satwa liar, dan meminimalkan kerusakan.
		Budaya	Integritas	menjaga dan meningkatkan kualitas lanskap perkotaan dan pedesaan, menghindari degradasi fisik dan lingkungan.
			Keragaman	menghormati keragaman budaya dan warisan sejarah, budaya asli, tradisi, adat istiadat dan kekhasan komunitas tuan rumah

Sumber : UNWTO-EP, 2005.

Tabel 2. Program, Aksi dan Hasil Yang Diharapkan

Step	Program	Aksi		Hasil
I	Pemetaan Potensi	1	mengidentifikasi potensi SDA, sosial, budaya dan permasalahan serta alternatif-alternatif penyelesaiannya;	Peta potensi ekonomi pariwisata
		2	mengidentifikasi dan mengkarakterisasi cluster produk, daya tarik dan keragaman potensi ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi pariwisata	
		3	mengidentifikasi infrastruktur pendukung (jalan, sanitasi, energi, komunikasi dll) terhadap produk pariwisata yang ditawarkan (kuliner, homestay, agen perjalanan, perdagangan, kerajinan, layanan pendukung pariwisata, dll.);	
		4	mengidentifikasi layanan pendukung kelembagaan (lembaga pemerintah, perusahaan dan asosiasi pariwisata, pusat pelatihan, lembaga/badan promosi dll).	
		5	mengidentifikasi aktor net-work dan menilai faktor-faktor yang menyebabkan daya saing pada tingkat yang berbeda (meta, makro, meso dan mikro);	
		6	mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang mendorong keberlanjutan ekonomi pariwisata pada tingkat yang berbeda (sosial, lingkungan, budaya dan kelembagaan);	
II	Analisis	1	menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor yang mendorong daya saing dan keberlanjutan dan pelaku utama dalam cluster usaha pariwisata;	Power distance
		2	menetapkan dan menganalisis profil kelembagaan yang menjadi ciri pelaku cluster yang disusun menjadi elemen dan peran masing-masing institusi.	
III	Pengembangan Destinasi	1	menyusun <i>master plan</i> dan <i>detailed engineering design rural tourism area</i> (DERTA);	Titik destinasi dan jalur wisata
		2	mengembangkan kapasitas internal komunitas pariwisata melalui pelatihan manajerial, produksi paket, pemanduan, kuliner, homestay, dan <i>digital destination marketing</i>	
		3	menyusun program pengembangan/pembangunan bersama masyarakat pariwisata berskala waktu;	
IV	Komersialisasi	1	melibatkan komunitas dalam pengembangan usaha pariwisata dengan pendekatan <i>entrepreneur tourism society</i> ;	Terbentuknya kelompok usaha
		2	mendorong partisipasi masyarakat pariwisata dalam event-event dan kegiatan kepariwisataan;	
		3	pengembangan produk wisata yang menggambarkan identitas pariwisata mereka sendiri	
		4	mendorong komunitas pariwisata untuk mempromosikan paket produk yang sudah mereka produksi	

Tabel 3. Variabel, Program dan Indikator Keberhasilan

Variabel	Program	Indikator Keberhasilan
Ekonomi	Pengembangan dana untuk pembangunan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat pariwisata, dengan : a. Mulai dengan kebutuhan dan tren pasar pariwisata b. Menfokuskan kluster produksi paket yang dijual ke pasar pariwisata yang kuat c. Menghubungkan usaha pariwisata dengan <i>supplier</i> (<i>agen perjalanan, hotel, dll</i>).	1. terbentuknya usaha pariwisata, perluasan kesempatan kerja 2. peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 3. distribusi pendapatan/keuntungan dirasa adil oleh anggota komunitas 4. keberdayaan kelembagaan ekonomi dalam proses produksi dan pemasaran paket wisata 5. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan dalam pengembangan pasar wisata
Sosial	Peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua dan terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas.	1. adanya kebanggaan komunitas 2. menghargai dan menghormati perbedaan agama, budaya, ras dan suku bangsa 3. harmonisasi sosial
Budaya	Mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan pengembangan budaya yang melekat dalam budaya pariwisata.	1. kelestarian budaya lokal 2. kesediaan mempertahankan dan mengembangkan keunikan budaya 3. kesediaan memfasilitasi pertukaran budaya komunitas
Lingkungan	Pengembangan <i>carrying capacity tourism area</i> , sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan kepedulian tentang pentingnya konservasi.	1. adanya kepastian akan keberlanjutan lingkungan; 2. kenyamanan lingkungan dan konservasi berjalan dengan baik
Politik	Peningkatan partisipasi komunitas pariwisata, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan mekanisme yang menjamin hak masyarakat pariwisata dalam pengelolaan SDA.	1. kesetaraan peran 2. adanya pengakuan, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan asset fisik menjadi destinasi wisata;